

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan,<sup>1</sup> sedangkan UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.<sup>2</sup>

Secara internasional batas usia anak di tentukan dalam *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa sejogjanya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas 16-18 tahun, Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun dan Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>3</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

<sup>3</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, 1997, *Pemahaman dan Penangulangannya*, Bandung: Citra Aditya Aditya Bakti, hlm. 8.

yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>4</sup>

Pada perkembangan dewasa ini semakin banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak secara perorangan maupun secara bersama-sama dilakukan dengan orang dewasa<sup>5</sup>, tindak pidananya pun beragam dari pencurian, pembunuhan bahkan pencabulan. Di Indonesia, jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak, menurut data dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, secara nasional Mei Tahun 2003, jumlah anak yang bermasalah dengan hukum berada di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara berjumlah 3004 anak. Di Medan anak pelaku kejahatan usia 13-18 tahun kurun waktu 1999-2004 berjumlah 499 orang.<sup>6</sup> Sedangkan di Surakarta menurut data Dirjen PAS dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada tahun 2011 terdapat 34 narapidana anak ditahan di rumah tahanan Negara Surakarta dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 87 narapidana anak.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012, *Penjelasan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Alinea.1

<sup>5</sup> I Nyoman Ngurah Suwamatha, *Kebijakan Hukum Pidana Anak Dalam Konsep KUHP 2010*, Jurnal Advokasi., No.1 Vol.1, September 2011, Universitas Islam Indonesia

<sup>6</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Bandung : PT. Refika Aditama, Hal. 9

<sup>7</sup> Dirjen PAS, 2011, Sistem Database Pemasyarakatan dalam <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/kanwil/db5f3920-6bd1-1bd1-b847-313134333039/year/2012/month/1>, di input pada tanggal 18 Agustus 2012

Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orangtua.<sup>8</sup>

Sebut saja contoh kasus pembunuhan di Bojong, Sawangan, Jawa Barat sangat mengejutkan. Pasalnya pelaku pembunuhan adalah seorang anak yang masih berusia 14 tahun sedangkan korbannya berusia 50 tahun dan 22 tahun. Keprihatinan bukan semata-mata peristiwa pembunuhan itu sendiri namun adalah masih ada anak Indonesia yang putus sekolah dan menjadi nakal bahkan sanggup menjadi eksekutor untuk dua orang dewasa sekaligus.<sup>9</sup> Kemudian yang baru-baru ini diberitakan adalah kasus tawuran pelajar di Jakarta yang menewaskan Deny Yanuar alias Yadud (17), siswa SMA Yayasan Karya 66, dimana pelakunya adalah 3 orang pelajar berinisial AD, GL dan EK ketiganya adalah siswa kelas XI SMK Kartika Zwni.<sup>10</sup>

Perkara anak juga dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan negeri di beberapa daerah seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 42/Pid. B/2012/PN. Mkt. tiga orang anak usia 15 tahun, 13 tahun dan 12 tahun melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak perempuan berusia 8 tahun sehingga korban mengalami sakit luka lecet pada bibir

---

<sup>8</sup> Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 103

<sup>9</sup> Sari Murti, Senin, 23 Juli 2012, *Ujian Pertama Undang-Undang Peradilan Anak*, dalam <http://krjogja.com/liputan-khusus/sorotan/1595/ujian-pertama-undang-undang-peradilan-anak.kr>

<sup>10</sup> Kompas.com, Kamis, 27 September 2012, 15.55 WIB, *Tersangka Pembunuh Yadut Jadi Tiga Pelajar*, dalam [http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/27/15343395/Tersangka.Pembunuh.Yadut.Jadi.Tiga.Pelajar?utm\\_source=WP&utm\\_medium=Ktpidx&utm\\_campaign=Tawuran%20Berdarah](http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/27/15343395/Tersangka.Pembunuh.Yadut.Jadi.Tiga.Pelajar?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=Tawuran%20Berdarah)

kemaluan kanan dan kiri sepanjang ½ cm, Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 13/PID.SUS/2012/PN. Klt dalam perkara seorang anak melakukan perbantuan penganiyaan terhadap seorang anak hingga mengalami luka berat, serta Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 42/Pid. Sus/2010/PN. Skh dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh seorang anak.<sup>11</sup>

Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding dengan usia pelaku,<sup>12</sup> karena anak secara umum tidak dapat berfikir dan kurangnya mempertimbangkan atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang motif pidananya.<sup>13</sup>

Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi apabila tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012, Putusan PN Mojokerto No. 42/Pid. B/2012/PN. Mkt, dalam

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f485d5a83e7f0ea64bf5ad355483f2f7>

<sup>12</sup> Nandang Sambas, *Op., Cit.*, Hal. 3

<sup>13</sup> Marlina, *Op., Cit.*, Hal. 2

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, Hal. 75

Dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berfikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.<sup>15</sup>

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik baginya di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita Negara.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI INDONESIA”***

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Marlina, *Op.,Cit*, Hal.2

<sup>16</sup> *Ibid*

1. Bagaimana ukuran kemampuan bertanggung jawab terhadap anak ?
2. Bagaimanakah unsur kesengajaan dan kealpaan dalam pertanggungjawaban pidana anak ?
3. Bagaimana sanksi dalam pertanggungjawaban pidana anak ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan ukuran kemampuan bertanggung jawab terhadap anak.
2. Untuk menjelaskan unsur kesengajaan dan kealpaan dalam pertanggungjawaban pidana anak.
3. Untuk menjelaskan sanksi dalam pertanggungjawaban pidana anak.

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai sistem pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia.
  - b. Memberikan gambaran dari hasil penelitian mengenai sistem pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis.

## D. Kerangka Pemikiran

Meninjau dari aspek yuridis, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*miderjarigeheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>17</sup>

Seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab apabila ia mampu menyadari perbuatannya dan mampu menentukan kehendak (tujuan) dari perbuatannya. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, kemampuan menyadari perbuatan tersebut dapat diartikan bahwa seseorang mampu menyadari bahwa perbuatannya dilarang atau dibolehkan oleh hukum (UU). Sedangkan mampu menentukan kehendak dapat diartikan bahwa seseorang dapat menentukan (mengharapkan) akibat perbuatannya.

Kesengajaan dalam KUHP (*crimine wetboek*) tahun 1809 dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, Hal. 3

perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. *Memorie van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan criminiel wetboek 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia tahun 1915) dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.<sup>18</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana, dengan terpenuhinya unsur-unsur delik dan pertanggungjawaban pidana maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Namun pemidanaan terhadap anak ini harus dibedakan dengan orang dewasa karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang melanjutkan perjuangan bangsa.

Adanya tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP tahun 2008, yakni:

(1) *Pemidanaan bertujuan:*

- a. *Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman negara dan masyarakat;*
- b. *Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan membimbing agar terpidana insyaf dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang berbudi dan berguna;*
- c. *Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh terpidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;*
- d. *Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*

Dalam tujuan pemidanaan, terdapat tiga teori yaitu: *Pertama*, teori absolut (teori pembalasan), tujuan penjatuhan pidana adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. *Kedua*, teori relatif (tujuan), menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh

---

<sup>18</sup> Marlina, *Op., Cit*, Hal. 2



orang-orang lain. *Ketiga*, teori gabungan, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu.<sup>19</sup>

## E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini penulis akan meneliti tentang sistem pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia yang dikonsepskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) diantaranya KUHP, UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yurisprudensi.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang keberadaannya memberikan data guna memperoleh gambaran kemudian menganalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia.

---

<sup>19</sup>Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### Data Sekunder

##### 1) Bahan hukum primer meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- d) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Yurisprudensi

##### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak.

##### 3) Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya berupa bahan dari media internet dan kamus.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

## Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah data terkumpul, ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang benar dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode dan mengklarifikasi data. Adapun model analisis yang penulis gunakan dalam penulisan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak di Indonesia adalah *inventarisasi hukum positif*, adapun tahap-tahap yang harus dilakukan untuk melakukan inventarisasi hukum ini adalah<sup>20</sup>:

- a. Menetapkan kriteria identifikasi tentang konsep hukum apa yang akan digunakan, dalam hal ini konsep hukum yang digunakan adalah konsep hukum positif yaitu undang-undang yang dibandingkan dengan undang-undang sejenis, dalam hal ini adalah KUHP yang mengatur pidana anak, UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No.3/1997 tentang Peradilan

---

<sup>20</sup> Kelik Wardiono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal.18

Anak dan UU No.11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan yurisprudensi.

- b. Melakukan pengumpulan terhadap berbagai hal (bahan-bahan), yang masuk dalam kriteria identifikasi dari konsep yang digunakan.
- c. Mengorganisir bahan-bahan yang telah ada, berdasarkan kategori tertentu, dalam hal ini mengorganisir setiap undang-undang kemudian menganalisis berdasar kategori ukuran kemampuan bertanggungjawab terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, unsur kesengajaan dan kealpaan dalam pertanggungjawaban pidana anak, sanksi dalam pertanggungjawaban pidana anak.

#### **F. Sistematika Skripsi**

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika skripsi.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang kemampuan

bertanggung jawab, tinjauan tentang kesengajaan dan kelalaian serta tinjauan tentang sanksi.

Bab III adalah Tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan hasil penelitian yaitu mengenai ukuran kemampuan bertanggungjawab terhadap anak, unsur kesengajaan dan kealpaan dalam pertanggungjawaban pidana anak, sanksi dalam pertanggungjawaban pidana anak dan analisis putusan hakim dalam perkara anak.

BAB IV adalah Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.